

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Yuliyanti (2016) meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Alat analisis yang digunakan uji regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R² diperoleh nilai 0,240 yang berarti bahwa 24,0% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak. Sisanya sebanyak 76,0% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel lingkungan wajib pajak tidak diteliti karena tidak berkontribusi secara langsung kepada wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Perbedaan juga ada pada sampel penelitian, pada penelitian tersebut sampel penelitiannya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak pribadi non karyawan atau pekerja bebas.

Pranadata (2014) meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batu. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner yang disebar sebanyak 100 buah kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan kuisioner yang diolah sebanyak 93 buah. Sampel penelitian diambil dengan metode *convenience sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak menunjukkan hasil yang negatif, hal tersebut berbeda dengan penelitian Yuliyanti yang menunjukkan hasil yang positif. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel yang tidak konsisten tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan, pada penelitian tersebut menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi tanpa kriteria sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Masruroh (2013) meneliti pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal). Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*.

Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis adalah 70 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh (negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini dilakukan untuk menuji variabel tersebut karena hasilnya tidak konsisten dengan penelitian Yuliyanti dan pranadata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel kemanfaatan NPWP yang tidak diteliti karena variabel tersebut tidak berkontribusi secara langsung pada wajib pajak terhadap motivasi pemenuhan ketentuan perpajakan. Sampel yang digunakan juga berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian tersebut wajib pajak yang digunakan sampel adalah pelaku usaha saja sedangkan penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pekerja bebas.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara

Indonesia dan berbeda dengan pendapatan yang lainnya. Halim dkk (2016) menyatakan karakteristik pajak sebagai berikut :

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
- c. Tidak ada imbal balik khusus secara langsung yang dapat ditunjukkan
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat

Berbagai sarana dan prasarana publik yang disediakan oleh pemerintah merupakan hasil yang dibiayai oleh pajak. Jadi peran pajak adalah sebagai sumber utama dan penentu pembangunan Negara untuk kesejahteraan rakyat. Atas hal tersebut maka dapat dirumuskan fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (anggaran) yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber anggaran atau sumber pendapatan Negara dan fungsi regulierend (mengatur) yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur sehingga mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya tidak dikenakan pajak ekspor untuk meningkatkan kegiatan ekspor. B. Ilyas dan Burton (2013) dalam bukunya menyatakan dalam perkembangannya, fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi adalah wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi redistribusi yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya tarif progresif yaitu tarif yang makin besar bagi yang berpenghasilan besar.

Fungsi pajak tidak akan menjadi maksimal apabila warga Negara (wajib pajak) tidak mendukung dengan patuh terhadap perpajakan. Dalam praktiknya pemungutan pajak menemui banyak hambatan yaitu perlawanan dari wajib pajak. Perlawanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang diakibatkan oleh sikap, pendapat dan persepsi tiap wajib pajak. Perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman akan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan Negara namun banyak persepsi yang timbul di masyarakat atas pendapatan pajak yang diterima. Selain itu, juga dikarenakan pajak merupakan biaya yang dikeluarkan tanpa adanya timbal balik secara langsung bagi wajib pajak. Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi antara lain :

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, masyarakat mulai menyadari bahwa sejumlah pajak yang dikeluarkan merupakan biaya peluang yang hilang sehingga masyarakat mulai enggan untuk membayar pajak
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, banyaknya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perpajakan memungkinkan banyak masyarakat yang belum memahami sehingga menurunkan kesadaran untuk membayar pajak
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, sistem kontrol yang kurang efektif menyebabkan masyarakat lalai

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Usaha yang secara aktif dilakukan oleh wajib pajak terdiri dari perbuatan yang tidak melanggar undang-undang atau bahkan perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang perpajakan yaitu :

- a) *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan proses memaksimalkan pada hal yang bukan objek pajak dan meminimalkan pada hal yang termasuk objek pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Contohnya adalah melakukan revaluasi aset tetap sehingga beban pajak menjadi kecil dikarenakan hanya dikenai PPh sebesar 10% atas selisih nilai aset.
- b) *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya (Tim pengampu perpajakan UMM, 2015). Contohnya adalah dengan melakukan manipulasi pendapatan dan beban yang mengakibatkan beban pajak menjadi kecil atau kemungkinan agar tidak membayar pajak, hal tersebut merupakan perlawanan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan atau penerimaan pajak yang seharusnya diterima Negara.

2. Subjek dan Objek Pajak

Secara umum subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak atau siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang KUP Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Secara umum objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak atau apa yang dipotong ataupun dipungut pajak. Halim dkk (2016) objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan yang diterima dari lembaga yang tidak disahkan oleh pemerintah dan harta hibah yang ketentuannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pemahaman Wajib Pajak

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* yaitu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Semenjak ada perubahan sistem tersebut maka wajib pajak dituntut untuk mandiri dalam mengurus kewajiban perpajakannya sehingga diperlukan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Resmi (2009) dalam Masruroh (2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki tersebut dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dari wajib pajak. Dessy (2017) menyatakan pemahaman akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi tujuan pemahaman wajib pajak adalah sebagai bekal wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

Pemahaman yang baik atas perpajakan diperlukan agar dalam pelaksanaan memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan secara tepat. Tingkat pemahaman maupun jenis pemahaman yang dimiliki tiap wajib pajak berbeda-beda maka indikator wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yaitu:

1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Pemahaman tersebut mengenai apa saja yang menjadi kewajiban dan hak wajib pajak serta prosedur dalam perpajakan

2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Pemahaman tersebut mengenai sistem pemungutan tiap objek pajak yang terutang oleh wajib pajak

3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan

Pemahaman mengenai fungsi perpajakan diharapkan mampu memunculkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan dan atau norma perpajakan

4. Kualitas Pelayanan Fiskus

Jatmiko (2006) menyatakan pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Berbagai macam pelayanan yang diberikan seharusnya memiliki kualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak sesuai dengan standar. Tujuan pelayanan yang berkualitas adalah untuk

menciptakan kondisi yang dinamis sehingga menghasilkan hal-hal sebagai berikut menurut Dessy (2017) :

- a. Produk yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak
- b. Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak
- c. Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak
- d. Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak

Penilaian atas kepuasan pelayanan yang diterima akan berbeda-beda oleh tiap individu. Purnaditya & Rohman (2015) dalam penelitiannya menyatakan ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:

1. Kehandalan (*Reliability*)

Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.

3. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan yaitu perilaku aparat pajak mampu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan rasa aman bagi wajib pajak. Jaminan juga berarti bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah wajib pajak.

4. Empati (*Emphaty*)

Empati berarti aparat pajak memahami masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal kepada wajib pajak dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Bukti fisik berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

Kualitas pelayanan akan mempengaruhi pendapat dan sikap wajib pajak. Pendapat baik atas pelayanan yang diterima akan menimbulkan timbal balik sikap yang baik dari wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas maka perlawanan terhadap pajak dapat diminimalisasi sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat. Artinya apabila pelayanan yang diberikan fiskus berkualitas, maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap perpajakan.

5. Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan adanya sanksi maka diharapkan mampu mencegah wajib pajak untuk mematuhi norma/ketentuan perpajakan. Ketegasan sanksi perlu dikaji dalam pelaksanaannya untuk menilai apakah sanksi yang telah ditetapkan berdampak pada motivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan.

Berbagai macam jenis sanksi dirumuskan untuk memberi efek jera bagi yang melanggar. Jenis sanksi dalam perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi pidana (Tim pengampu perpajakan UMM, 2015). Sanksi administrasi pada umumnya dikenakan pada wajib pajak yang melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPT. Sanksi administrasi ini dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh secara formal terhadap ketentuan perpajakan. Dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 7 ayat (1) menyatakan sanksi administrasi keterlambatan menyampaikan SPT adalah sanksi denda Rp 500.000 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN; sebesar Rp 100.000 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa lainnya atau SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi; serta sebesar Rp 1.000.000 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak badan. Pasal 9 mengatur pengenaan sanksi bunga 2% per bulan apabila wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah jatuh tempo. Pasal 8 ayat (5) mengatur pengenaan kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran SPT.

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak misalnya melakukan tindakan secara sengaja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Pengenaan sanksi pidana ini ditujukan pada wajib pajak yang tidak patuh secara materiil terhadap penerimaan pajak. Misalnya setiap orang karena secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar maka didenda

paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Setiap orang yang sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP maka dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Menurut M. Zain (2008) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek disiplin kepada wajib pajak sehingga wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih patuh dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak agar tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksudnya adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Ketegasan sanksi tanpa toleransi harus ditegakkan secara adil bagi seluruh pihak yang melanggar.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan oleh tiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini dilandasi oleh keinginan yang berasal dari tiap individu wajib pajak yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori yang mendasari penelitian terhadap kepatuhan ini adalah teori atribusi. Nugraheni (2015), atribusi merupakan proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Atribusi bersumber dari dalam diri orang tersebut (internal) maupun pihak eksternal. Harold Kelley sebagai pengembang teori ini, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan itu biasa dilakukan pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun, apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara yang sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal yang berpengaruh.

Teori atribusi relevan dalam penelitian ini karena pengukuran persepsi atas pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dilakukan dari dalam diri sendiri ataupun kesan wajib pajak kepada perpajakan akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak. Gunadi (2005) dalam Yogatama (2014) menyatakan kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pendapat, sikap dan persepsi wajib pajak, jadi wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan. Peningkatan kepatuhan penting untuk

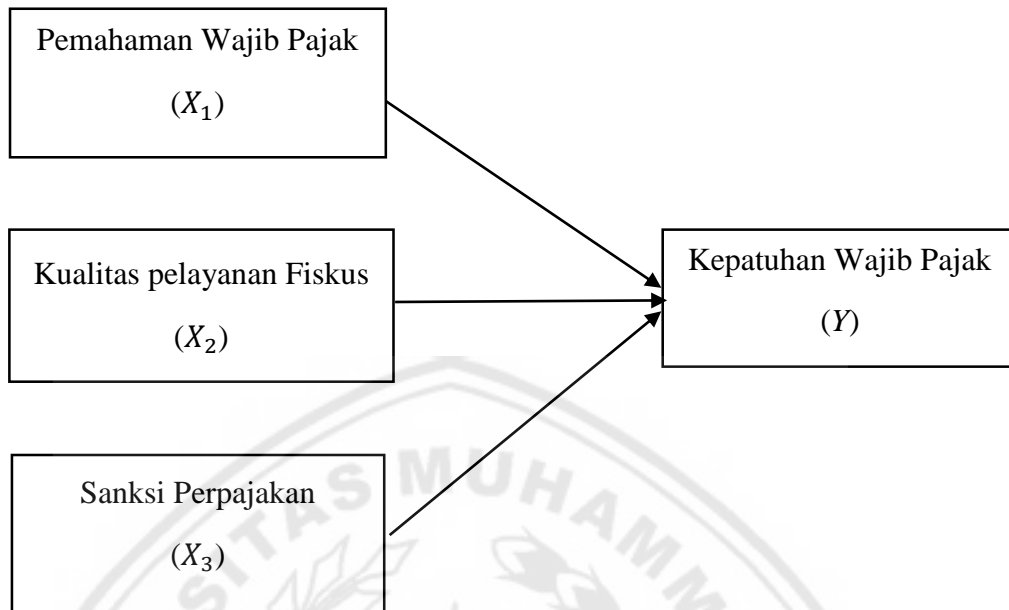
meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam Kusuma (2016) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi :

- a) Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya kepatuhan dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b) Kepatuhan Materiil, yaitu lebih menekankan pada aspek jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Misalnya wajib pajak patuh karena mengungkapkan pendapatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pajak yang dibayarkan telah sesuai.

Dalam penelitian Suntono & Kartika (2015) variabel kepatuhan wajib pajak mengacu pada kriteria Wajib Pajak Patuh dalam Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain :

- 1) Tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir
- 2) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani
- 3) Menghitung pajak terutang dengan benar yang dilakukan setiap akhir tahun
- 4) Tepat waktu membayar pajak maupun menyampaikan SPT
- 5) Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 6) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan

7. Kerangka Pemikiran Teoritis



C. Perumusan Hipotesis

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman maka akan merasa acuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian Yuliyanti (2016) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka atas pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu :

H_1 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Jika pelayanan yang dilakukan aparat pajak (fiskus) baik dan memberikan kesan baik terhadap wajib pajak ada kemungkinan wajib pajak akan rajin dalam melaporkan SPT dan membayar pajak, begitu pun sebaliknya jika pelayanan tidak baik akan ada kemungkinan hal tersebut dapat membuat wajib pajak malas untuk melaporkan atau membayar pajak. Jadi, kualitas pelayanan fiskus akan mempengaruhi pendapat dan sikap wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan terhadap perpajakan. Yuliyanti (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka atas pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

H_2 = Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa takut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain ketegasan sanksi pajak, seharusnya juga didukung dengan pemahaman atas sanksi oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai, maka wajib pajak akan merasa takut diberi sanksi yang kemudian dapat menjadi patuh. Hasil penelitian Yuliyanti (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka atas pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu :

H_3 = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi